

305.443
PAK
2 e1



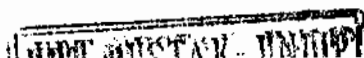
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

ANALISIS PERSPEKTIF GENDER TERHADAP
TINGKAT KEBERHASILAN PEMERINTAHAN
KEPALA DESA WANITA DAN KEPALA DESA PRIA
DI JAWA TENGAH

Oleh:

Drs. G.B. Pakpahan, M.M.
Drs. Mugihardjo

PUSAT PENELITIAN GENDER / PSW
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG, 2001



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Perspektif Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan
Pemerintahan Kepala Desa Wanita dan Kepala Desa Pria
di Jawa Tengah

Bidang Ilmu : Ekonomi/Manajemen

Ketua Tim Peneliti :
Nama : Drs. G.B. Pakpahan, M.M.
NIP : 130 345 805
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV-B
Jabatan fungsional : Lektor Kepala

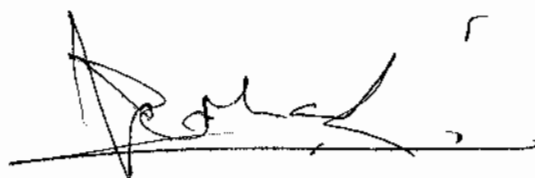
Anggota Peneliti : Drs. Mugihardjo

Jumlah Dana : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Sumber Dana : Pusat Penelitian Gender / PSW, Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro, Tahun Anggaran 2001

Semarang, Oktober 2001

Ketua Peneliti,



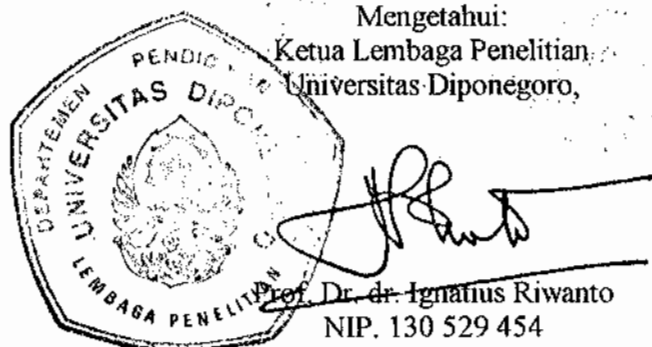
Drs. G.B. Pakpahan, M.M.
NIP. 130 345 806

Menyetujui:
Kepala Puslit Gender/PSW
Lembaga Penelitian UNDIP,



Dra. Finuk Istiarti, M.Kes.
NIP. 131 764 483

Mengetahui:
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Ignatius Riwanto
NIP. 130 529 454

ABSTRAKSI

Pengembangan peran kaum wanita atau perempuan dalam kegiatan pembangunan sudah banyak dilakukan, bahkan sudah masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan kepala desa/kelurahan dilihat dari perspektif gender. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbandingan dalam efektivitas kepemimpinan dan daya kompetensi atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dibawah kendali kepala desa/kelurahan laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten (daerah pedalaman) dan Kabupaten Kendal (daerah pesisiran). Pemilihan kedua daerah tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan untuk mewakili karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang secara garis besarnya dapat dibedakan atas masyarakat pesisiran dan masyarakat pedalaman. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan diskusi kelompok, serta dari publikasi yang relevan. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yang dibatasi jumlahnya. Responden terdiri atas 16 orang kepala desa atau kelurahan (masing-masing 8 orang per daerah) dan 173 orang warga masyarakat (88 orang di Kendal dan 85 orang di Klaten) pada desa/kelurahan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengetahui profil sosial ekonomi masyarakat, uji perbedaan rata-rata atas karakteristik variabel (kompetensi manajerial dan evaluasi kepemimpinan yang efektif), dan plotting untuk mengetahui tangga kepemimpinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari separo responden penelitian menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa/kelurahan mereka cenderung menunjukkan arah yang demokratis. Dapat disebutkan bahwa tipe hubungan dari tangga kepemimpinan dari kepala desa/kelurahan yang terbanyak adalah yang memberikan empati, diikuti dengan yang menggerakkan dan yang melibatkan diri. Diharapkan dengan semakin adanya pembelajaran pada masyarakat dan pemimpin pemerintahan diharapkan kisaran tangga kepemimpinan mempunyai posisi ke arah tangga yang semakin tinggi, atau menunjukkan derajat kualitas kepemimpinan yang relatif lebih baik.

Secara umum dapat disebutkan bahwa menurut sebagian besar responden, tidak terdapat perbedaan peluang (probabilitas) kepemimpinan dan kinerja kepala desa atau kelurahan dilihat dari perspektif gender. Kepala desa atau kelurahan laki-laki tidak selalu lebih baik dibandingkan perempuan. Hal tersebut karena perempuan juga memiliki kemampuan dalam memimpin organisasi dan masyarakat, termasuk menjadi kepala desa/kelurahan. Apalagi di masa kini sudah cukup banyak perempuan yang menjadi pemimpin dan dapat berhasil dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hasil uji perbedaan rata-rata terhadap efektivitas keberhasilan kepemimpinan dari kepala desa/kelurahan dilihat dari perspektif gender diketahui bahwa secara statistik tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada lima komponen. Dari hasil temuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sebenarnya kompetensi manajerial kepala desa/kelurahan laki-laki tidak berbeda dengan kompetensi manajerial kepala desa/kelurahan perempuan. Dengan kata lain, sebaiknya peluang untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan sudah selayaknya untuk diberikan kepada pihak yang mempunyai kompetensi manajerial dan strategi dengan tidak bias kepada masalah gendernya.

Setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meraih kepemimpinan yang efektif. Kelima hal itu adalah: (1) pengetahuan dalam organisasi, (2) mempunyai reputasi dan kondisi baik, (3) mempunyai kemampuan dan ketrampilan strategis, (4) mempunyai personalitas dan integritas yang tinggi, dan (5) mempunyai daya motivasi yang tinggi. Nilai skor dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata nilainya adalah sedang. Nilai tertinggi dari komponen efektivitas kepemimpinan adalah reputasi dan kondisi yang baik. Ini menunjukkan bahwa reputasi adalah relatif sudah cukup baik. Sedangkan faktor-faktor lainnya juga dapat dianggap sedang saja.

Uji perbedaan menurut lokasi antara daerah pesisir (Kabupaten Kendal) dan daerah pedalaman (Kabupaten Klaten) maka dari variabel efektivitas kepemimpinan memperlihatkan perilaku yang berbeda. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan dari kinerja manajerial pimpinan pemerintahan desa atau kelurahan di daerah pesisiran dan pedalaman. Tidak dapat dimungkiri bahwa budaya, kebiasaan, dan adat-istiadat dari masing-masing daerah atau yang melatarbelakangi pemimpin pemerintahan sedikit banyak mewarnai corak atau tipe kepemimpinannya, yang mungkin memberikan hasil kerja yang berbeda

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Daftar Tabel	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kontribusi Penelitian	4
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 5
2.1. Peranan Wanita Dalam Pembangunan	5
2.2. Ukuran Keberhasilan	5
 BAB III : METODE PENELITIAN	 9
3.1. Pemilihan Daerah Penelitian	9
3.2. Jenis dan Sumber Data	9
3.3. Metode Penarikan Sampel	10
3.4. Metode Analisis	11
 BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN	 15
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	15
4.1.1 Kabupaten Klaten	15
4.1.2 Kabupaten Kendal	18
4.1.3 Keadaan Umum Desa Contoh: Ceper	19
4.1.4 Keadaan Umum Desa Contoh: Karangayu	26
4.2. Profil Sosial Ekonomi Responden	34
 BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	 37
5.1. Gaya Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan	37
5.2. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Berperspektif Gender	43
5.3. Efektivitas Kepemimpinan Ditinjau dari Daya Kompetensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Perbandingan Perspektif Daerah	51

BAB VI : PENUTUP	54
6.1. Kesimpulan	54
6.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
3.1	Distribusi Sampel Menurut Klasifikasinya	11
3.2	Definisi Variabel Operasional untuk Kompetensi Manajerial	12
3.3	Definisi Variabel Operasional untuk Evaluasi Efektivitas Kepemimpinan	14
4.1	Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Menurut Mata Pencaharian	16
4.2	Kondisi Demografis dari Angkatan Kerja di Desa/Kelurahan Sampel di Kabupaten Klaten	17
4.3	Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kabupaten Kendal Menurut Mata Pencaharian	18
4.4	Jarak antara Desa Ceper dengan Lokasi Kesehatan	23
4.5	Macam-macam Penggunaan Lahan di Desa Ceper	24
4.6	Pembagian Lahan di Desa Ceper Berdasarkan Kepemilikan	25
4.7	Jarak antara Desa Karangayu dengan Lokasi Kesehatan	30
4.8	Macam-macam Penggunaan Lahan di Desa Karangayu, Tahun 2001	31
4.9	Pembagian Lahan di Desa Karangayu Berdasarkan Kepemilikan, Tahun 2001	32
4.10	Statistik Deskriptif Beberapa Karakteristik Responden	34
4.11	Tingkat Pendidikan Responden	35
4.12	Jumlah Anggota Keluarga Responden	35
4.13	Pekerjaan Utama Responden	36
5.1	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Responden	37
5.2.	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Persepsi Responden Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Klaten	38

5.3.	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Persepsi Responden Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Kendal	38
5.4	Pendapat Responden tentang Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa/Kelurahan dengan Bawahannya/Rakyatnya	40
5.5	Pendapat Responden tentang Keberhasilan Kepala Desa/Kelurahan dalam Kinerja dan Pemerintahan	41
5.6	Pendapat Responden tentang Probabilitas Keberhasilan Kepala Desa/Kelurahan Laki-laki dibandingkan Perempuan	42
5.7	Pendapat Responden bahwa Kepala Desa Laki-laki lebih baik Dibandingkan Kepala Desa Perempuan	43
5.8	Uji Perbedaan Skor Efektivitas Kepemimpinan Ditinjau dari Kompetensi Manajerial antara Kepala Desa/Kelurahan Laki-laki dengan Perempuan	45
5.9	Pendapat Responden tentang Kompetensi Manajerial Kepala Desa (Faktor 1: Proses Manajemen Strategi dan Operasi)	46
5.10	Pendapat Responden tentang Kompetensi Manajerial Kepala Desa (Faktor 2: Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan)	47
5.11	Pendapat Responden tentang Kompetensi Manajerial Kepala Desa (Faktor 3: Manajemen Administrasi dan Operasional)	48
5.12	Pendapat Responden tentang Kompetensi Manajerial Kepala Desa (Faktor 4: Kepemimpinan dan Penempatan Semangat Kerja Tim)	49
5.13	Pendapat Responden tentang Kompetensi Manajerial Kepala Desa (Faktor 5: Pengaruh dan Persuasi Kerja)	50
5.14	Pendapat Responden tentang Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa	51
5.15	Uji Perbedaan Skor Kinerja dan Efektivitas Kepemimpinan antara Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten dan Kendal	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai warga negara maupun sebagai sumberdaya insani pembangunan, wanita atau perempuan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam aktivitas pembangunan di segala bidang dan tingkatan. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktif mereka dalam pembangunan (GBHN, 1998). Dengan demikian maka potensi peranan dan pemberdayaan wanita dalam pembangunan masyarakat baik yang terdapat di daerah perkotaan maupun pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama dalam menangani berbagai masalah sosial ekonomi khususnya yang diarahkan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemeliharaan dan keberlangsungan lingkungan secara keseluruhan.

Pengembangan peran kaum wanita atau perempuan dalam kegiatan pembangunan sudah banyak dilakukan, bahkan sudah masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Sudah banyak kepala desa ataupun kepala kelurahan di Indonesia yang disandang oleh kaum wanita. Apalagi di era sekarang ini negara kita juga dipimpin oleh seorang presiden wanita, dan ini merupakan sejarah dalam kehidupan kenegaraan dan pemerintahan kita selama ini. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai “manajer” pemerintahan desa atau kelurahan, tentunya banyak hambatan dan tantangan yang harus dilalui oleh mereka. Namun demikian tidak sedikit kepala desa atau kepala kelurahan perempuan mencapai prestasi yang lebih berhasil ataupun gemilang dalam melaksanakan pekerjaan mereka dibandingkan kepala desa atau lurah laki-laki. Hal tersebut misalnya disebabkan adanya dukungan kemampuan dalam hal pendidikan dan pengalaman berorganisasi dari kaum wanita itu sendiri.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai seorang individu dalam menjalankan tugasnya pada suatu organisasi (misalnya unit usaha, perusahaan, dan instansi pemerintahan) maka perlu dilihat bagaimana kemampuan kompetensinya atas tugas dan fungsi yang diberikan kepada mereka. Istilah “kompetensi” (*competency*)

sendiri dapat diartikan sebagai memahami tugas yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya (NTB, 1991). Apakah seorang manager perusahaan, kepala kantor, atau seorang kepala desa mempunyai tingkat kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya? Apabila seorang pengambil keputusan mempunyai tingkat kompetensi (*competency*) yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas manajerialnya maka dia akan cenderung mempunyai kemampuan bersaing atau kompetensi yang tinggi. Dengan kata lain kemampuan kompetensi dapat menentukan keberhasilan seseorang dalam memimpin suatu perusahaan ataupun institusi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menentukan tingkat kompetensi seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya antara lain adalah ketrampilan (*skills*), atribut kualitas dan kapasitas seseorang atas pekerjaan yang diembannya (Wallace et al., 1998).

Dari bukti empiris yang dilakukan oleh banyak penulis terdahulu disebutkan bahwa konsep kompetensi menjadi isu yang penting di Australia dan negara-negara lainnya (Wallace et al., 1998; Cockeriil, 1989; Johnson, 1992; Battersby, 1994). Dengan demikian banyak para pengamat yang ingin menerapkan pendekatan yang berbasis pada kompetensi (*a competence-based approach*) dalam menyelenggarakan proses ataupun evaluasi dari manajemen dalam lingkup tugas dan tanggungjawab pekerjaan mereka. Dalam penelitian yang dilakukan ini konsep yang berbasis pada kompetensi digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan tugas ataupun kewajiban yang diemban oleh seorang kepala desa atau kelurahan. Dalam penelitian ini penilaian tingkat keberhasilan kepala desa dilihat dari segi kepemimpinan gender (kader perempuan dan laki-laki). Pihak mana yang mempunyai kompetensi yang lebih unggul dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya akan didefinisikan mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih baik dalam memimpin pemerintahan desa atau kelurahannya.

Sampai saat sekarang ini penelitian yang mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa atau kelurahan dilihat dari perspektif gender dengan menggunakan konsep baru (pendekatan berbasis pada kompetensi manajerial) jumlahnya sangat terbatas di Indonesia. Namun demikian kita menyadari bahwa isu yang berkaitan dengan kompetensi manajerial merupakan isu yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pembangunan, termasuk dalam manajemen pemerintahan desa atau kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah derajat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan?
2. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan antara yang berada dibawah kendala kepala desa/kelurahan perempuan dan kepala desa/kelurahan laki-laki?
3. Apakah ada perbedaan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa/kelurahan perempuan dan laki-laki, baik di daerah pesisir maupun di daerah pedalaman?
4. Apa saja hambatan, tantangan dan kelebihan yang ada pada kepala desa/kelurahan perempuan dalam menyelenggarakan pemerintah desa/kelurahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan kepala desa dilihat dari perspektif gender (perempuan dan laki-laki) di daerah penelitian. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menganalisis derajat atau tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dilihat dari perspektif gender;
2. Menganalisis perbandingan terhadap efektifitas kepemimpinan dan daya kompetisi atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di bawah kendali kepala desa/kelurahan perempuan dan laki-laki;
3. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa/kelurahan perempuan dan laki-laki di daerah pesisir maupun daerah pedalaman;
4. Mengidentifikasi hambatan, tantangan dan kelebihan yang dihadapi oleh kepala desa/kelurahan perempuan dan laki-laki dalam menyelenggarakan pemerintahan desa/kelurahan yang baik.

1.4. Kontribusi Penelitian

Sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu, penelitian yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dari kepala desa/kelurahan dilihat dari perspektif gender masih sangat terbatas jumlahnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti ini, antara lain Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pengurus PKK, Dharma Wanita, Kantor Peranan Wanita, dan institusi yang terkait lainnya. Informasi tentang teknik penelitian, diskripsi sosio-ekonomi dan beberapa temuan penting lainnya diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan referensi bagi para mahasiswa maupun peneliti serta para pengambil keputusan yang terkait dan berkompeten dengan permasalahan dalam penelitian ini.